

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
TERHADAP PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN  
PERBANKAN YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK  
INDONESIA  
TAHUN 2013-2014

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Prasyarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

CHRISTIN PRISKILA PRATAMA  
11126038

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA  
2015

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
TERHADAP PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN  
PERBANKAN YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK  
INDONESIA  
TAHUN 2013-2014

SKRIPSI



Oleh:

CHRISTIN PRISKILA PRATAMA  
11126038

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA  
2015

**TANDA PERSetujuan SKRIPSI**

Nama : CHRISTIN PRISKILA PRATAMA  
NPM : 11126038  
Fakultas : EKONOMI  
Jurusan : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
TERHADAP ENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN  
PERBANKAN YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK  
INDONESIA 2013-2014

Pembimbing,

Tanggal: 20 Agustus 2015

  
Nadya Yuristant, S.E.M.M.

Mengetahu:

Ketua Program Studi

Tanggal: 21 Agustus 2015

  
(Dra. Jeanne A. Wawolangi.,M.Si.,Ak)

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh **Christin Priskila Pratama** dengan NPM 11126038

Telah diuji pada 28 Agustus 2015

Diyaikan **LULUS** oleh:

Ketua Tim Penguji



Jeffrey Rono., (S1, S2)

Mengetahi,

Dekan Fnkltas Ekonomi,

Ketua Program Studi,



(Dra. Maria Widyastuti, MM.)



(Dra. Jeanne A. Wawolangi. M.Si., Ak)

LIMBAR PENGESAILAN SKRIPSI

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP  
PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG GO  
PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA 2013-2014

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan  
Tim pengji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darra Cendika  
Program Studi Akuntansi

Pada hari Jumat, Tanggal 28 Agustus 2015

Disusun oleh.

Nama : Christin Priskila Pratama  
NPM : 11126038  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi

Tim Pengji:

Nama

1. Drs. Soedjono Ron., M.M. (Ketua)
2. Nadya Yuristanti, S.F., M.M. (Pembimbing)
3. Dra. Jeanne A. Wawolangi, M.Si., Ak (Anggota)



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Christin Priskila Pratama

NPM : 11126038

Alamat Asli : Jl Manggis 15

No Identitas KTP : 3578226401930001

Denpan ini menyatakan bahwa skripsi dcugaujud 1:

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENILAIAN  
KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK  
INDONESIA 2013-2014

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, *working paper* atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas akhir) ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku secara umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulis.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya teruyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Dharma Cendia termasuk pencabutan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Surabaya, 16 September 2015

Hormat saya,  
Christin Priskila Pratama



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis yakin tanpa bimbingan dan penyertaan-Nya, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, dorongan, semangat, nasihat, motivasi, bantuan, serta saran dan kritikan, dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Y. Budi Hermanto, M. M. Selaku rektor Universitas Katolik Darma Cendika atas kesempatan yang telah diberikan kepada Penulis untuk menyusun skripsi ini.
2. Ibu Dra. Maria. Widyastuti, M. M. Selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Darma Cendika atas kesempatan yang telah diberikan kepada Penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Ibu Dra. Jeanne A Wawolangi.,M.Si.,Ak selaku Kepala Program Studi Akuntansi yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan serta arahan dan telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu.

4. Ibu Nadya Yuristanti, S.E., M.M selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta para staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan baik.
7. Papa, Mama, dan Adik tercinta yang telah memberikan dukungan dan bantuan, moril dan materiil selama masa studi penulis hingga terselesainya skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat tercintaku Ranny dan kawan-kawan semua, terima kasih atas dorongan, motivasi dan semangatnya.
9. Kepada pacar saya tercinta, terima kasih telah membantu dan membimbing serta memberikan banyak dorongan, semangat dan doa sehingga membuat penulis lebih terpacu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan, untuk itu penulis mau menerima segala saran serta kritik untuk memperbaiki penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. *God Bless You All.*

Surabaya, Agustus 2015

Penulis

## **ABSTRACT**

*Application of Good corporate governance has been the main issue on supporting the recovery and growth of the Economy. Along with the growth and development of global economy, Company being pushed to be equal as it. Then it needs a good management and control of managerial system in the company. With the existence of good corporate governance, hopefully can give the positive contribution either for the internal or external of the company. This research aims to know how far the application of good corporate governance to five Banks, including Bank Mandiri, Bank Central Asia, Panin financial, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia. This research also aims to know application of good corporate governance principles in 5 banks mentioned above.*

*Result of the research shows that generally, application of good corporate governance principles that includes transparency, autonomy, responsibility, accountability, and fairness of the 5 banks above being finely did though that still was a few problems to be faced. As for the problems being faced by that 5 banks mostly is credit Banking tightening problem, Productivity of bank products that is not fully efficient and effective, the high human resources standard as the cause of globalisation era and internal fraud problem.*

*Advice from the researcher is to I anticipating the new laws from government and Bank Indonesia. Giving a big attention for the market share development, by keep creating the added value for the shareholders and stockholders. The effective and competent Human resources Training needs to be arrange appropriately with the employee development needs.*

*Key words : Good Corporate Governance, Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*

## ABSTRAK

Penerapan *good corporate governance* telah menjadi isu sentral dalam mendukung pemulihan, serta pertumbuhan perekonomian. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global, perusahaan dituntut untuk dapat mengimbangnya. Maka diperlukan adanya sistem pengelolaan serta pengendalian manajerial yang tepat pada perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada lima bank yaitu Bank Mandiri, Bank Central Asia, Panin Financial, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di kelima bank tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi transparansi, kemandirian, pertanggungjawaban, akuntabilitas dan kewajaran pada kelima bank tersebut dilaksanakan dengan cukup baik meskipun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi kelima bank tersebut sebagian besar yaitu kendala pengetatan kredit perbankan, produktivitas produk bank yang belum sepenuhnya efisien & efektif, Standar SDM yang tinggi akibat dari era globalisasi dan masalah kasus penyimpangan internal (*internal fraud*).

Saran yang diberikan peneliti adalah : (1) mengantisipasi kebijakan baru oleh Pemerintah dan Bank Indonesia ; (2) menaruh perhatian yang besar pada pengembangan pangsa pasar, dengan terus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham serta stakeholder lainnya; (3) Program-program pelatihan SDM yang efektif dan kompeten perlu disusun sesuai dengan kebutuhan pengembangan karyawan.

Kata kunci: *good corporate governance*, keterbukaan, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, kewajaran.

## DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	F
ABSTRACT.....	IV
ABSTRAK.....	V
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR LAMPIRAN.....	vm
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1. <i>Good Corporate Governance</i> .....	7
2.1.1.1. Teori <i>Good Corporate Governance</i> .....	7
2.1.1.2. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	10
2.1.1.3. Keuntungan, Manfaat, dan Kegagalan Penerapan GCG.....	19
2.1.1.4. <i>Corporate governance</i> di Indonesia.....	21
2.1.2. Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan.....	23
2.2. Penelitian Terdahulu.....	24
2.3. Kerangka Pemikiran.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	30
3.2. Variabel Penelitian.....	30
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	31
3.4. Populasi dan Sampel.....	33
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5.1. Jenis Data.....	34
3.5.2. Sumber Data.....	34
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
4.1. Gambaran Obyek Penelitian.....	36
4.1.1. Bank Negara Indonesia.....	36
4.1.2. Bank Mandiri.....	38
4.1.3. Bank Rakyat Indonesia.....	42
4.1.4. Bank Central Asia.....	45
4.1.5. Panin Financial.....	48
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	50
4.2.1. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Bank Negara Indonesia.....	50

4.2.2. Penerapan Good Corporate Governance Bank Mandiri.....	53
4.2.3. Penerapan Good Corporate Governance Bank Rakyat Indonesia.....	60
4.2.4. Penerapan Good Corporate Governance Bank Central Asia.....	65
4.2.5. Penerapan Good Corporate Governance Panin Financial.....	68
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada kenyataannya, pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang dibuat oleh manajemen perusahaan dalam rangka untuk memberikan informasi yang cukup, jelas, transparan, dapat diandalkan, dan kredibel kepada para pemegang saham ternyata tidak cukup, tidak jelas, tidak transparan, tidak *reliable* dan tidak kredibel. Hasil survei dari Pricewaterhouse dan Coopers atas posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya termasuk Australia terhadap *investor-investor* internasional di Asia tahun 2004 (FCGI 2004) menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang terendah dalam bidang standar pengungkapan, transparansi dan penerapan *auditing*. Indonesia berada dikelompok yang paling buruk bersama dengan Thailand, Cina dan India (Nuryaman 2009).

*Good Corporate Governance* itu sendiri memiliki beberapa aspek penting yang harus diperhitungkan oleh kalangan bisnis. Aspek-aspek ini diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang menjadi momok dalam perusahaan. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai

perkembangan strategi dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*) ([www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com)).

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pelaporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya perusahaan secara optimal. Penilaian kinerja keuangan perusahaan penting dilakukan oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan mendeteksi kinerja keuangan perusahaan, maka dapat diidentifikasi kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh & menjadi patokan apakah manajemen berhasil atau tidak menjalankan kebijakan yang telah digariskan perusahaan (Kasmir, 2008). Kinerja keuangan yang baik merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dimana peningkatan nilai atau citra perusahaan merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan para pemiliknya, atau untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham perusahaan (Bringham & Houston, 2006).

Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan cenderung menghadapi beberapa hambatan yang umumnya bersifat fundamental, yaitu: (1) Kurang mampu untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, yang mencakup semua bidang aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi,

manajemen, pemasaran, produksi), (2) Konflik kepentingan yang sering terjadi antara manajemen dengan pemegang saham (masalah keagenan), dan (3) Perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada peryandang dana ekstem, bahwa dana ekstem digunakan secara tepat & efisien, serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kondisi demikian, mencerminkan masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam mengelola perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya standar-standar akuntansi & regulasi, pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, standar-standar pengungkapan, & transparansi serta proses kepengurusan perusahaan.

Dalam upaya mengatasi sistem pengelolaan perusahaan, maka para pelaku ekonomi & bisnis di Indonesia menyepakati penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai suatu sistem pengelolaan perusahaan yang tepat. GCG menjadi suatu pokok pembahasan yang penting dan relevan untuk diteliti karena diperlukan untuk menyiapkan sistem dan struktur yang kuat serta kokoh bagi korporasi di Indonesia dan merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh & menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan *go-public*. Bukan hanya itu, krisis ekonomi dunia dikawasan Asia & Amerika Latin merupakan fakta lain dari pentingnya sistem pengelolaan perusahaan yang baik, karena krisis tersebut diyakini muncul disebabkan gagalnya penerapan GCG. Diantaranya, sistem *regulatory* yang buruk, standar akuntansi & audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas (Suprayitno, 2004).

Hasil survey Bank Dunia pada tahun 2007 menunjukkan bahwa Indonesia, dalam hal penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), berada pada peringkat terendah bila dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN. Hal ini secara tidak langsung semakin jelas membuktikan bahwa masih lemahnya perusahaan publik di Indonesia termasuk perusahaan perbankan dalam menerapkan tata kelola korporat yang baik (*Good Corporate Governance*). Melihat akan hal ini, maka kebutuhan akan pelaksanaan GCG sudah merupakan kebutuhan yang mendesak bagi perusahaan. Adalah keharusan bagi perusahaan untuk menerapkan & melaksanakan GCG agar tujuan perusahaan tercapai.

Hasil penilaian Bank Indonesia menunjukkan, 69% perbankan masih melanggar GCG, terutama pelanggaran oleh bank-bank kecil swasta. Menurut Deputi Gubernur BI, Siti Fadriah pelanggaran yang terjadi terutama pada masalah komisaris independen dalam dewan komisaris (53%). Pelanggaran dalam pembentukan mencapai 30,7%, untuk kasus tidak terpenuhinya jumlah komisaris independen adalah sekitar 18%, pelanggaran terhadap keharusan independensi presiden direktur dari pemegang saham mencapai 10%, serta kasus rangkap jabatan mencapai 7%. ([www.unisodem.org](http://www.unisodem.org), 2007).

Dalam menjalankan komitmennya untuk melaksanakan praktik *good corporate governance* yang baik dan dalam rangka mematuhi peraturan Pasar Modal, maka Perusahaan akan sesegera mungkin menyampaikan informasi tentang keuangan perusahaan kepada para *stakeholder* untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, dan mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh pemegang

saham, kreditur, dan kepentingan lainnya dalam *annual report*. Sehingga perusahaan tersebut akan mengalami perbaikan citra, dipercaya oleh para stakeholders dan pada gilirannya, terjadi peningkatan nilai perusahaan. Pencatatan akurat, klasifikasi, dan pelaporan transaksi dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap standar pengungkapan dan audit eksternal mengarah pada kualitas informasi dan sistem pelaporan yang baik. (Virginia & Eleni, 2008).

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan penelitian berjudul "Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Go publik di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014"

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* terhadap penilaian kinerja perusahaan perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia pada Kantor yang berkedudukan di Surabaya ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini adalah : Untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* terhadap penilaian kinerja perusahaan perbankan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia pada Kantor yang berkedudukan di Surabaya..

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja perusahaan.

##### **Manfaat Teoritis**

Bagi peneliti, ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori dan literatur yang diperoleh di bangku kuliah kemudian memperdalam pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir tentang prinsip-prinsip GCG dan kinerja perusahaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Good Corporate Governance*

###### 2.1.1.1 Teori *Good Corporate Governance*

Syakhroza (2003) menyatakan teori *good corporate governance* dapat diformulasikan dalam model-model *good corporate governance* yang bersifat *mainstream* seperti *finance model (agency theory)*, *stewardship model (stewardship theory)*, *stakeholders model (stakeholders theory)* atau *political model (political theory)* serta *myopic market-model*.

*Agency theory* mengasumsikan bahwa manajer akan bertindak secara oportunistik dengan mengambil keuntungan pribadi sebelum memenuhi kepentingan pemegang saham. Teori Agensi ini timbul karena adanya perkembangan ilmu manajemen modern yang menggeser teori klasik, yaitu adanya aturan yang memisahkan pemilik perusahaan (*principal*) dengan para pengelola perusahaan (*agent*). Ketika perusahaan berkembang menjadi besar, apalagi pemegang saham semakin tersebar, semakin banyak *agency cost* yang terjadi dan pemilik semakin tidak dapat melakukan kontrol yang efektif terhadap manajer yang mengelola perusahaan. Potensi konflik kepentingan bisa terjadi di antara pihak-pihak yang berhubungan seperti antara pemegang saham dengan manajer perusahaan (*agency costs of equity*) atau antara pemegang saham dengan kreditur (*agency costs of debt*). Menurut mereka *agency cost* itu meliputi tiga hal, yaitu *monitoring costs*, *bonding costs* dan *residual loss*. *Monitoring costs* merupakan pengeluaran yang dibayar oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen agar tidak menyimpang. Biaya ini timbul karena

adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Dalam situasi tertentu, agen memungkinkan untuk membelanjakan sumber daya perusahaan (*bonding costs*) untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi masih bisa terjadi perbedaan antara keputusan-keputusan agen dengan keputusan-keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan agen. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami prinsipal disebut dengan *residual loss*. Teori *agency* ini sangatlah sulit untuk diterapkan dan banyak kendala serta masih belum memadai, sehingga diperlukan suatu konsep yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap para *stakeholders*, yang menyangkut masalah-masalah konflik kepentingan dan biaya-biaya agensi yang akan timbul, sehingga berkembanglah suatu konsep baru yang memperhatikan dan mengatur kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait dengan kepemilikan dan pengoperasional (*stakeholders*) suatu perusahaan, yang dikenal dengan konsep *good corporate governance* (Syakhroza, 2003).

*Stewardship model* mengasumsikan bahwa manajer adalah pelayan perusahaan yang baik dan rajin bekerja untuk mencapai tingkat laba dan tingkat pengembalian modal yang tinggi bagi pemegang saham. Manajer dapat memotivasi dirinya sendiri serta bekerja dengan inisiatif sendiri dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan teori ini, keberadaan dewan komisaris yang berperan sebagai pengawas direksi mungkin menjadi tidak efektif (Syakhroza, 2003).

*Stakeholders model* mengasumsikan bahwa perusahaan merupakan suatu sistem dari jaringan *stakeholders* yang beroperasi di dalam sistem yang lebih besar dalam suatu sistem masyarakat yang menyediakan infrastruktur pasar dan hukum bagi aktivitas perusahaan. Tujuan perusahaan dalam hal ini adalah menciptakan nilai bagi seluruh *stakeholders* dengan menciptakan barang dan jasa, dalam model ini *good corporate governance* merupakan sistem yang dirancang untuk memungkinkan dilakukan *check and balance mechanism* untuk menjamin terpeliharanya keseimbangan internal dan eksternal organisasi.

*Political model* menyatakan bahwa alokasi kekuasaan dalam perusahaan, *privilege* atau alokasi laba di antara pemilik, manajer dan *stakeholders* lainnya ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan politis. Dalam hal ini pemerintah dapat berperan penting dalam menentukan alokasi tersebut. Alokasi kekuasaan dalam teori *good corporate governance* juga harus dilihat dari perspektif budaya, sehingga dapat dikatakan tidak ada satu model *good corporate governance* yang dapat digunakan sekaligus untuk beberapa negara, bahkan oleh beberapa perusahaan dalam satu negara.

*Myopic market model* menyatakan bahwa pasar sudah efisien, yaitu informasi yang tersedia di pasar sudah lengkap dan sempurna, serta tidak ada informasi yang tidak simetris sehingga kinerja perusahaan tercermin sepenuhnya pada harga pasar. Pasar dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif terhadap perilaku perusahaan walaupun pada kenyataannya informasi di pasar cenderung terdistorsi karena belum bekerjanya pasar secara efisien.

### 2.1.1.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

*Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) sebagai salah satu lembaga yang mempunyai inisiatif mempromosikan konsep *corporate governance* telah mengeluarkan seperangkat prinsip GCG yang dikembangkan seuniversal mungkin. Prinsip-prinsip yang disusun bertujuan bagaimana caranya manajemen perusahaan, (yaitu para direktur) bertanggung jawab kepada pemiliknya (yakni pemegang saham). Para pengambil keputusan atas nama perusahaan adalah dapat dipertanggungjawabkan, menurut tingkatan yang berbeda pada pihak lain yang dipengaruhi oleh keputusan tersebut, termasuk perusahaan itu sendiri, para pemegang saham, kreditor dan para publik penanam modal.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut OECD meliputi:

1) Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak meliputi hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk : menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan, atau memindahkan saham yang dimilikinya, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, memilih anggota dewan komisaris dan direksi, memperoleh pembagian keuntungan perusahaan

2) Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk

mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu kelas, melarang praktik-praktik insider trading dan self dealing, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan, jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung *conflict of interest*.

3) Peranan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan

Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholder, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha

4) Keterbukaan dan transparansi

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan di sajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan

5) Akuntabilitas dewan komisaris (*board of directors*)

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan

oleh dewan, komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya.

Indikator yang dipakai dalam menilai eksistensi GCG ini adalah (Regar, 2001):

1). *Transparacy* (Transparansi)

Transparansi bisa dalam informasi maupun dalam pengambilan kebijakan. Transparansi dalam informasi adalah penungkapan informasi oleh manajemen yang diwajibkan oleh UU baik dilakukan sukarela atau untuk memenuhi etika bisnis. Transparansi tidak berarti mengemukakan semuanya kepada publik, pengertian transparansi juga mengakui adanya rahasia perusahaan dalam hal misalnya jika diungkapkan dapat menimbulkan dampak negatif kepada perusahaan. Dalam akuntansi istilah yang dipakai adalah "*disclosure*" yang diwajibkan dalam akuntansi hanya *disclosure* yang mengungkapkan semua hal yang dianggap signifikan atau material yang dinilai dapat mempengaruhi keputusan mereka.

Transparansi dalam kebijakan yaitu memberikan kesempatan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui secara jelas prosedur dan tata cara yang ditempuh oleh manajemen dalam mengurus perusahaan atau mengambil keputusan akan melakukan prosedur yang wajar tanpa membonceng kepentingan tertentu. Atau bisa juga memberikan informasi secara akurat, benar, teratur, dan tepat waktu.

2). *Accountability* (Akuntabilitas)

Menciptakan sistem pengawasan yang efektif yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham, dan pengawas. Semua harus merasa bertanggung jawab kepada "*principal*" atas segala kebijakan yang diambilnya. Dan mereka mampu menunjukkan bahwa semua yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana mestinya. Bahkan jika ia termasuk orang yang mempercayai Tuhannya maka dia harus merasa bertanggung jawab juga pada Tuhannya, nanti dihari akhirat (hari pertanggungjawaban).

3). *Fairness* (Keadilan)

Untuk mewujudkan keadilan maka harus diterapkan : perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham, perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.

4). *Controllability; verifiability*

Semua proses manajemen harus dapat diawasi secara efektif semua harus dapat diverifikasi atau ditelusuri dengan memiliki bukti yang valid sehingga semua kegiatan dapat di ikuti jejaknya dan berada dalam pengawasan yang ketat sehingga semua kegiatan benar-benar mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan secara efisien dan efektif tanpa disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

5). *Responsibility*

Mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan wewenang yang diberikan oleh para principal atau pemilik. Dari sudut lain, responsibility bermakna perusahaan harus dapat dan mampu merespons semua

aturan, hukum, etika, tradisi yang berlaku sehingga ia menjadi warga yang bertanggungjawab dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Menurut Dahlan (2003) terdapat empat prinsip utama yang sering didengungkan guna mencapai *good corporate governance* yang efektif yaitu:

#### 1) Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan syarat utama dalam rangka perolehan dan penggunaan informasi yang diperlukan agar bisa dilakukan koordinasi yang efisien. Transparansi ini berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai kinerja perusahaan secara tepat waktu dan akurat. Transparansi ini ditunjukkan dengan pengungkapan *informasi financial* dan *non financial*.

#### 2) Prinsip *Fairness* (Kewajaran)

Prinsip *fairness* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari adanya penggelapan, transaksi internal (*insider trading*) atau mungkin adanya *irregulatties* yang lain. Prinsip ini berkaitan dengan hak legal dan kontraktual dari pihak-pihak yang berkepentingan dan membantu menetapkan batas dan parameter yang berkaitan dengan tujuan perusahaan yang telah dimandatkan kepada manajemen.

#### 3) Prinsip *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Prinsip ini berbicara mengenai bagaimana perusahaan bertanggung jawab kepada *stakeholders* atau lingkungannya.

#### 4) Prinsip Akuntabilitas

Prinsip ini merupakan kunci untuk memberikan insentif dan disiplin yang memadai bagi manajemen. Prinsip akuntabilitas ini digunakan untuk

menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi, dan komisaris,

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *Good Corporate Governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate Governance* (KNKCG) terdapat pedoman umum *good corporate governance* yaitu:

1) Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota

keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan, perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## 2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.

- c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan..
- d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*)..
- e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati..

### 3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

#### Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*bylaws*)..
- b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

#### 4) Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

##### Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan, dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif
- b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif

#### 5) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

##### Pedoman Pokok Pelaksanaan

- a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

- b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik

### 2.1.1.3 Keuntungan, Manfaat, dan Kegagalan Penerapan GCG

Beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika perusahaan mampu menerapkan *good corporate governance* ini adalah (Cooper, 2000) : mudah mendapatkan tambahan modal dari investor, kreditur, biaya modal yang lebih rendah, akan dapat memperbaiki kinerja perusahaan, dapat mempengaruhi harga saham sehingga menjadi lebih baik, memperbaiki kinerja ekonomi perusahaan, meminimalisasi biaya *'agency cost'*, meningkatkan citra (*image*) perusahaan di masyarakat.

Manfaat GCG yang terangkum dari berbagai sumber baik praktisi maupun pengamat (Suratman, 2000) adalah : entitas bisnis akan menjadi efisien, meningkatkan kepercayaan public, menjaga *going concern* perusahaan, dapat mengukur target kinerja perusahaan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi distorsi (manajemen *risk*).

Adanya kegagalan beberapa perusahaan dan timbulnya kasus malpraktik keuangan akibat krisis adalah buruknya praktik GCG. Menurut Pangestu dan Hariyanto (dalam Suprayitno, et.al., 2004), karakteristik lemahnya praktik CG adalah : (1) adanya konsentrasi kepemilikan dan kekuatan *insider shareholder*

(termasuk pemerintah dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pusat kekuatan) ; (2) lemahnya *governance* sektor keuangan, dan ; (3) ketidakefektifan *internal rules* dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas untuk berhadapan dengan pemegang saham mayoritas dan manajer.

Agar CG Efektif maka para manajer perusahaan dapat berperan secara aktif terhadap *corporate governance* dapat melakukan tindakan-tindakan berikut, antara lain, (Suratman, 2000) : (1) mengidentifikasi secara layak, mengevaluasi, dan mengelola resiko dan peluang ; (2) menindaklanjuti kebijakan perusahaan dan menjelaskan tujuan perusahaan secara lengkap ; (3) mentaati standar-standar etika; dan ; (4) memandang dewan direksi perusahaan sebagai 'ahli' dan kewenangan legal.

Dalam sudut pandang makro, pelaksanaan *good corporate governance* membawa dampak yang sangat baik terhadap masyarakat secara keseluruhan. Banyak hal positif yang bisa dicapai dengan dilaksanakannya *corporate governance*, secara mikro, manfaat GCG bagi perusahaan adalah efisiensi dan produktivitas (Indrayani dan Norkholis, 2001). Hal ini sangat dibutuhkan oleh kompetisi global karena produktivitas dan efisiensi usaha adalah jawaban dalam menghadapi kompetisi global.

Menurut FCGI (2003) dengan melaksanakan *corporate governance*, ada beberapa manfaat yang harus dipetik antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.

- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan deviden. Khusus bagi BUMN akan membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

#### **2.1.1.4 Corporate governance di Indonesia**

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi fokus utama dalam pengembangan iklim usaha di Indonesia terutama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pengembangan *corporate governance* terus dilakukan, mengingat posisi Indonesia dalam bidang ini masih sangat memprihatinkan. Survey tahun 1999 yang dilakukan PricewaterhouseCoopers dengan responden investor institusional di Singapura menunjukkan bahwa praktek *corporate governance* di Indonesia masih sangat rendah. Sementara hasil survey *Corporate Governance Watch 2007* yang dikeluarkan oleh CLSA Asia-Pacific Markets suatu investment group independen di Hong Kong, menempatkan Indonesia pada posisi terendah bersama Philipina dari 11 pasar Asia yang disurvei, dengan kelemahannya pada peraturan, praktik, penegakkan, akuntansi, budaya *governance* dan lingkungan politik.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang dan mewujudkan GCG. Pada tahun 1999 Pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate governance* (KNKCG) yang kemudian pada November 2004 berganti nama

menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yang lingkup tugasnya lebih luas tidak hanya membuat kebijakan *governance* di sektor korporasi tetapi juga di sektor publik. Komite ini memiliki fungsi untuk memprakarsai pengembangan tata kelola yang baik sekaligus memantau perbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia. Pada tahun 2001 KNKCG telah berhasil menerbitkan pedoman praktik GCG (*Code of Good Corporate Governance*). Swasta juga berperan dalam mengembangkan *corporate governance* ini, dengan membentuk organisasi non-pemerintah seperti *Forum for Corporate Governance for Indonesia* (FCGI) pada tahun 2000, *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *Corporate Leadership Development in Indonesia* (CLDI), dan *Indonesian Institute of Independent Commissioners* (IIC).

Bae *et al.* (2004) menyatakan bahwa untuk memperbaiki *corporate governance*, Pemerintah harus memperkuat ketentuan hukum yang melindungi kepentingan pemegang saham dan meningkatkan penegakan hukum dan peraturan tersebut. Demikian juga perusahaan harus memperbaiki *corporate governance*•nya. Becht *et al.* (2005) menyatakan bahwa paling tidak terdapat sedikitnya dua alasan perlunya intervensi dari regulator. Pertama, regulasi yang dikeluarkan regulator (pemerintah) akan mendukung peraturan-peraturan pokok yang ada di perusahaan, karena peraturan yang dibuat oleh pendiri perusahaan atau pemegang saham bersifat subyektif dan tidak efisien dan tidak mungkin dapat melibatkan seluruh pihak yang terlibat sehingga dengan regulasi yang ada dapat mencapai persetujuan yang komprehensif. Kedua, walaupun perusahaan pada awalnya memiliki hak untuk mendesain peraturan yang efisien, mereka mungkin ingin membatalkan atau mengubahnya di kemudian hari, masalah akan timbul ketika

perusahaan tidak memiliki komitmen, untuk tidak mengubah atau membatalkan peraturan yang telah dibuatnya. Ketika pemegang, saham tersebar dan tidak terlibat aktif dalam perusahaan hal itu mungkin terjadi bahwa manajemen mengubah aturan untuk kepentingannya sendiri.

### **2.1.2 Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan.**

Kinerja keuangan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan, (perbankan) di manapun, karena kinerja keuangan tersebut merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan, dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja keuangan suatu perusahaan, emiten sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (*stakeholders*) seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah dan pihak manajemen sendiri. Pemegang saham (*investor*) menginginkan dana yang diinvestasikan akan memberikan imbal hasil (*return*) sesuai dengan tingkat yang diinginkan. Akan tetapi pemegang saham tidak dapat terlibat secara langsung kegiatan perusahaan sehingga tidak dapat memonitor secara langsung kegiatan perusahaan. Laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan rugi laba dari suatu perusahaan, bila disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran, keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu.

Sawir (2005) menyatakan bahwa untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analis keuangan memerlukan beberapa tolok ukur. Tolok ukur yang sering dipakai adalah rasio atau indeks, yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan bagi analis yang ahli dan berpengalaman

dibandingkan, analisis yang hanya didasarkan atas data keuangan sendiri-sendiri yang tidak berbentuk rasio.

Mamduh dkk (2005) menyatakan bahwa rasio-rasio keuangan pada dasarnya disusun dengan menggabungkan- gabungkan angka-angka di dalam atau antara laporan rugi-laba dan neraca. Dengan cara rasio semacam itu diharapkan pengaruh perbedaan ukuran akan hilang. Jenis-jenis analisis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio *market evaluation*.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

### 1) Cahyani Wulandari (2009)

Cahyani meneliti "Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh CGPI Indeks, komposisi aktiva, kesempatan tumbuh dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang diproksi oleh kinerja operasional (ROE) dan kinerja pasar (Tobins Q).

Konsep *corporate governance* timbul karena adanya keterbatasan dari teor keagenan dalam mengatasi masalah keagenan. Secara keseluruhan konsep *corporate governance* timbul sebagai upaya untuk mengendalikan atau mengatasi perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri. *Corporate governance* menciptakan mekanisme dan alat kontrol untuk memungkinkan terciptanya sistem pembagian keuntungan dan kekayaan yang seimbang bagi *stakeholder* dan menciptakan efisiensi bagi perusahaan.

Variabel independent pada penelitian, ini adalah CGPI Indeks, komposisi aktiva, kesempatan tumbuh dan ukuran perusahaan. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan yang diproksi oleh kinerja operasional (ROE) dan kinerja pasar (Tobins Q). Uji statistiknya digunakan regresi linier berganda. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001 sampai dengan 2005.

Kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: (1) CGPI indeks dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja operasional (ROE) ; (2) kesempatan tumbuh dan komposisi aktiva tidak berpengaruh terhadap kinerja operasional (ROE) ; (3) CGPI indeks, kesempatan tumbuh, komposisi aktiva dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar (Tobins Q).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang pada penggunaan variabel *good corporate governance*, kinerja perusahaan dan analisis regresi berganda. Perbedaannya : (1) variabel independent pada penelitian terdahulu adalah pengaruh CGPI Indeks, komposisi aktiva, kesempatan tumbuh dan ukuran perusahaan, sedangkan pada penelitian sekarang adalah kepemilikan institusional dan dewan komisaris (*good corporate governance*); (2) obyek penelitian terdahulu perusahaan di Bursa Efek Indonesia tahun 2001-2005, sedangkan penelitian sekarang perusahaan perbankan tahun 2013-2014.

## **2) Erna Hidayah (2008)**

Erna Hidayah meneliti "Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi Terhadap Hubungan antara Penerapan Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan di Bursa Efek Jakarta". Tujuan penelitian untuk mengetahui skor

CGPI, Indeks pengungkapan wajib, ketepatan waktu pengungkapan, komposisi aktiva, kesempatan tumbuh dan ukuran perusahaan, terhadap kinerja pasar (Tobins Q).

Pemerintah Indonesia, telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong penerapan GCG, antarlain pada tahun 1999 membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang telah mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance, Pada tahun 2004 KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pada tahun 2006 KNKG menyusun Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, yang merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktek GCG kepada pemangku kepentingan. Bahkan sejak tahun 2000 Baepam bersama dengan pihak lain terkait, juga terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG kepada semua pelaku pasar di Pasar Modal Indonesia. Sejak tahun 2001, The Indonesian Corporate Governance (IICG) sebuah lembaga swasta, bahkan telah melakukan penelitian tentang proses penerapan GCG diperusahaan publik.

Variabel independent pada penelitian ini adalah skor CGPI, Indeks pengungkapan wajib, ketepatan waktu pengungkapan, komposisi aktiva, kesempatan tumbuh dan ukuran perusahaan. Variabel dependent adalah kinerja pasar (Tobins Q). Sampel yang digunakan adalah semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2000-2005.

Kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut : (1) skor CGPI, Indeks pengungkapan wajib, ketepatan waktu pengungkapan, komposisi aktiva,

kesempatan tumbuh tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar (Tobins Q) ;  
(2) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja pasar (Tobins Q).

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang pada penggunaan variabel Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. Perbedaannya : (1) penelitian terdahulu menggunakan *Corporate Governance* dengan proksi skor CGPI indeks, penelitian sekarang menggunakan kepemilikan institusional dan dewan komisaris (*corporate governance*); (2) penelitian terdahulu menggunakan kinerja perusahaan dengan proksi Tobins'Q, penelitian sekarang menggunakan NPL; (3) obyek penelitian terdahulu adalah semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2000-2005, penelitian sekarang menggunakan perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014.

### 3) Wahid Afifurrahman (2008)

Wahid melakukan penelitian "Pengaruh Pengungkapan Sukarela Melalui Web Site Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta". Tujuan penelitian adalah menguji pengaruh pengungkapan sukarela melalui web *site* terhadap nilai perusahaan.

Pelaporan keuangan merupakan media bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi tentang perusahaan kepada *stakeholders*. Informasi yang diungkapkan dapat berupa pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Banyaknya informasi yang diungkapkan kepada publik memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Perkembangan teknologi internet sebagai sarana komunikasi telah memungkinkan perusahaan untuk menyediakan laporan keuangannya di *web*.

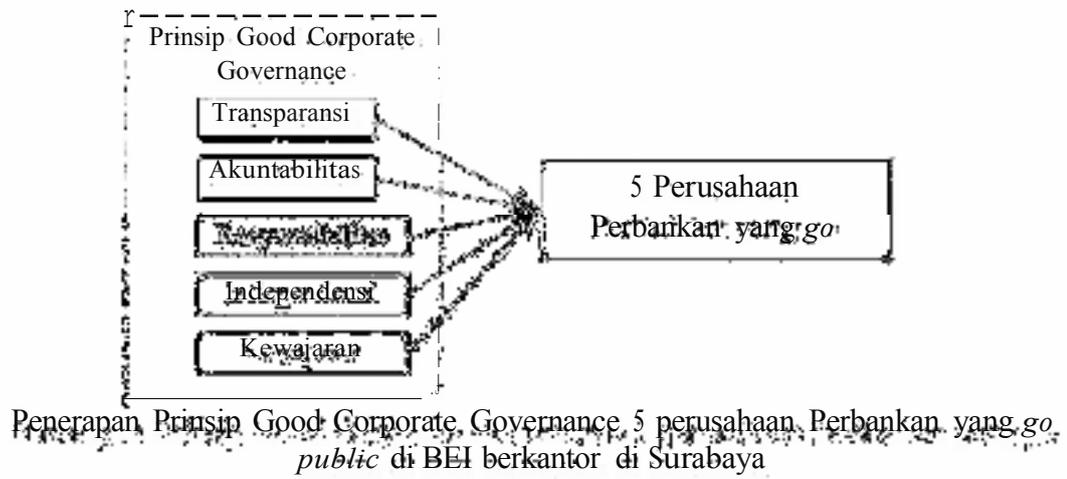
*site* internet perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar diluar negeri telah menyadari potensi media *web site* dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang dianggap akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Berbagai informasi mengenai perusahaan dapat ditemukan pada *web site*, mulai dari berita mengenai aktivitas diperusahaan hingga analisis mengenai prospek perusahaan.

Variabel independent pada penelitian terdahulu adalah pengungkapan informasi sukarela melalui website, ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas dan leverage. Variabel dependent adalah nilai perusahaan. Penelitian terdahulu menggunakan Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dan terdaftar serta sedang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2005. Uji statistik menggunakan analisis regresi linier berganda.

Kesimpulan hasil penelitian terdahulu adalah : (1) indeks pengungkapan sukarela melalui website, profitabilitas dan leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan ; (2) ukuran perusahaan dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang pada kinerja perusahaan. Perbedaannya : (1) penelitian terdahulu menggunakan kinerja perusahaan dengan proxy Tobins\*Q, penelitian sekarang menggunakan rasio NPL ; (2) obyek penelitian terdahulu adalah semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2005, penelitian sekarang menggunakan perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

### 2.3. Rerangka Pemikiran



Gambar2.1. Kerangka Pemikiran

